

ABSTRAK

Kreditor dalam kepailitan dibagi menjadi tiga yaitu kreditor yang diistimewakan (kreditor preferen), kreditor separatis (pemegang jaminan kebendaan), dan kreditor konkuren. Dalam hal terjadi kepailitan, pekerja merupakan kreditor preferen yang pembayaran upah terutangnya harus didahulukan. Namun pada prakteknya, tidak jarang para pekerja yang kesulitan dalam memperoleh pembayaran upah karena harta pailit menjadi jaminan kreditor separatis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban kreditor separatis terhadap pembayaran hak pekerja debitor pailit dalam penjualan objek jaminan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator atau pekerja apabila kreditor separatis tidak memberikan bagian dari penjualan objek jaminan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan wajib memberikan hasil penjualan objek jaminan untuk tagihan kreditor yang diistimewakan sebagaimana dalam pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU. Dimana menurut Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, pekerja merupakan salah satu kreditor yang diistimewakan. Sehingga kreditor separatis dalam hal ini wajib memberikan hasil penjualan objek jaminan untuk pembayaran upah. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan jika kreditor separatis tidak memberikan bagian dari penjualan objek jaminan adalah dengan mengajukan gugatan “hal-hal lain” ke Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum terkait pembagian harta pailit yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU.

Kata Kunci: Pembagian Harta Pailit, Kreditor Separatis, dan Pekerja

ABSTRACT

Creditors in bankruptcy are divided into three namely *privileged* creditors (preferred creditors), separatist creditors (material security holders), and concurrent creditors. In the event of a bankruptcy, the worker is the preferred creditor whose payment of the wage must be prioritized. But in practice, it is not uncommon for workers who have difficulty in obtaining payment of wages because bankruptcy assets are guaranteed by separatist creditors. The purpose of this study is to analyze the obligations of separatist creditors towards the payment of bankrupt debtor workers' rights in the sale of collateral objects as well as legal remedies that can be done by curators or workers if the separatist creditor does not provide a part of the sale of collateral objects. This research is a type of doctrinal research (doctrinal research) that uses a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study indicate that separatist creditors as holders of material guarantees are required to provide proceeds from the sale of collateral objects for *privileged* creditor bills as in article 60 paragraph (2) UUK-PKPU. Where according to Decision of the Constitutional Court No. 67 / PUU-XI / 2013, workers are one of the *privileged* creditors. So that separatist creditors in this case are required to provide proceeds from the sale of collateral objects for payment of wages. Meanwhile, legal remedies that can be done if the separatist creditor does not provide part of the sale of collateral objects is by filing a lawsuit "other matters" to the Commercial Court within the scope of general court regarding the distribution of improper bankrupt assets as regulated in the Elucidation of Article 3 paragraph (1) UUK-PKPU.

Keywords: Distribution of Bankruptcy Assets, Separatist Creditors, and Workers

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan ini penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis ini. Tidak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Proposal tesis berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT YANG MENJADI JAMINAN KREDITOR SEPARATIS** ini disusun untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pada kesempatan kali ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan Proposal tesis ini, yaitu:

1. Segenap Dosen dan Staf Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Seluruh keluarga dan para sahabat
3. Rekan-rekan mahasiswa “MIH Bisnis” Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis sangat terbuka pada segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan Proposal Tesis yang masih punya kekurangan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Proposal Tesis ini dapat bermanfaat bagi Civitas Akademika Universitas Airlangga Surabaya dan seluruh pembaca.

Sidoarjo, 20 Mei 2020

Penulis

Tri Wahyu Anggraeni, SH.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Staatsblaad No. 23 Tahun 1847 Tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo. 67/PUU-XI/2013